

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Hakam, dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Ali, Mukti, *Makalah Perbandingan Konsep Negara Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).
- Alrasyid, Harun. *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Asy'ari, Hasyim, *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).
- Dahl, Robert, *Polyarchy: Participation And Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971).
- Dwi, Tri, & Dikdik, *Bahan Ajar Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012).
- Hakam, Abdul, dkk, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Banten: Sada, 2023)
- Hamid, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah Pengukuhan Guru Besar*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).
- Nazmi, Didi, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992).
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dan Demokrasi Lokal*, (Bandung: Nusa Media, 2014).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Ramlan Surbakti, *Pemilu, Demokrasi, dan Kelembagaan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 2017).
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, & Hasyim Asyari, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011).
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Rowa, Hyronimus, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, (Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2015).
- Saldi Isra, *Kekuasaan Kehakiman dan Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Solikhin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

### **Jurnal**

- Benuf, Kornelius & Azhar, Muhamad, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer",

- Jurnal Gema Keadilan* 7, Edisi 1 (Juni 2020), halaman 20-33.  
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Carlos, Roberto, “Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan”, *Journal of Islamic Law El Madani* 3, No.1, (Desember 2023), halaman 87-97.  
<https://doi.org/10.55438/jile.v2i2.99>
- Pardede, Marulak, “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Rechtsvinding* 3, No.1, (April 2014), halaman 85-99.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/File/58/52>
- Puji, Syafaat, & Abdul, *Analisis* “Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil”, *Jurnal Sultan* 3, No. 1, halaman 60-68.  
[https://doi.org/10.35905/sultan\\_htn.v3i1.10630](https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v3i1.10630)
- Rizal, Abid, & Nofi, “Ambang Batas (Electoral Threshold) Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024)”, *Jurnal Dinamika* 31, No.1, (Januari 2023), halaman 11885-11898.  
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/27251/20637>
- Salsabila, Riko, Serilya, Naufal, & Sholla, “Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles Serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 1, (Januari 2023), halaman 1-25.  
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/149>
- Silalahi, Wilma, “Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”, *Jurnal APHTN-HAN* 1, No.1, (Januari 2022), halaman 66-79.  
<https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/11/11>
- Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial”, *Jurnal Rechtsvinding* 3, No. 1, (April 2014), halaman 19-31.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/File/54/48>
- Titi Anggraini dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, “Manajemen Penyelenggaraan Pemilu dan Beban Kerja Penyelenggara,” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 9 No. 1, (2020), halaman 45–62.

## **Tesis**

Wolo, Hironimus, *Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Atma Jaya, 2015). <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/26059>

## **Skripsi**

Dara, Nila, *Implikasi Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, (Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/32851>

## **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1608).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833).

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXIII/2025.

**Internet**

Hukumonline, "*Dilema Putusan MK 135/2024*", 17 Juli 2015  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-1t6877dad13409d/>